

DAFTAR PUSTAKA

- Afjan, W. Y. P., & Hayat. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Studi pada Dinas Sosial Kota Malang). *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 102-117.
- Angga, E., & Sihombing, P. (2020). Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Bagi Gelandangan dan Pengemis di Balai Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis di Pulau Jawa. *Jurnal Sosial*, 5(1), 45-58.
- Ayunda, R., Tobing, S. E., & Rachmawati, L. (2020). Jumlah pengemis berdasarkan penjangkauan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Data administrasi kependudukan. Kemendagri, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2021. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Batam Pos. (2024, Maret 21). Razia rutin Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Retrieved from <https://www.batampos.co.id>

- Ferananda, R. A. (2019). Kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak dalam Menangani Pengemis di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(1), 65-79.
- Ferezagia, M. (2018). Faktor-faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 9(2), 123-136.
- Hutauruk, P. R., & Putri, I. (2021). Program rehabilitasi sosial di UPT Nilam Suri Kota Batam. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 11(3), 245-258.
- Khairunnisa, T., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Smart Urban Service, Upaya Rehabilitasi dan Preventif Pengemis dan Gelandangan di Kota Yogyakarta. *Jurnal Urban Studies*, 6(4), 200-213.
- Martika, S., & Kartika, D. (2019). Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Pemerintah Kota Batam, Batam.
- Nasution, A., & Thamrin, H. (2016). Implementasi Kebijakan Program Pembinaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 55-70.
- Peraturan Daerah Kota Batam No 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial di Kota Batam.

- Pramu, E., & Hutajulu, H. (2023). Pengaruh ketidaksetaraan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Batam. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 15(4), 321-334.
- Rachmawati, L. (2020). Definisi dan kategori pengemis menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012. Kementerian Sosial RI, Jakarta.
- Rachmawati, L., & Rahayu, S. (2020). Tantangan pemerataan pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Nasional*, 12(1), 45-58.
- Subu, V. A., Dwimawanti, I. H., & Yuningsih, T. (2021). Analisis Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Penanganan Gelandangan dan Pengemis pada Dinas Sosial Kota Serang: Studi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2010. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(3), 90-105.
- Syahroni, A., & Pambudi, R. (2019). Hubungan antara pengemis dan kemiskinan di Kota Batam. *Jurnal Sosial Masyarakat*, 10(2), 167-180.
- Ulumudin, A., Juliasih, L., & Kurniawan, A. (2021). Evaluasi Program Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut. *Jurnal Penelitian Kebijakan*, 9(2), 55-70.
- Wahyuniati, D., & Abbas, M. (2019). Kemiskinan di Kota Batam: Akses pendidikan dan kesehatan di sektor informal. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 8(3), 233-247.

Widodo, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Pontianak. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 43-56.

Yudha, M. S., Afjal, H., & Hayat, T. (2023). Implementasi Peraturan Daerah No 9 Tahun 2013 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis di Kota Malang. *Jurnal Kebijakan Publik dan Pembangunan*, 14(2), 299-312.